



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 754/I/2013

II/JANUARI 2013

DPR DESAK KEMENKES SEGERA SELESAIKAN BERBAGAI KASUS MALPRAKTEK



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA JANUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Kegiatan DPR-RI minggu kedua bulan Januari 2013 pada Masa Sidang III 2012-2013, terfokus pada bidang legislasi yang dialokasikan 60% dari seluruh waktu masa sidang, dan pengawasan dan anggaran yang dialokasikan 40%. Berikut adalah beberapa poin kegiatan DPR minggu kedua Januari 2012.

Kegiatan Bidang Legislasi

Komisi-Komisi DPR, Badan legislasi dan Panitia Khusus yang menangani RUU sedang melanjutkan pembahasan tentang beberapa RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I diantaranya adalah RUU Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Ormas, dan beberapa RUU lainnya. Sementara itu, anggota DPR, Komisi serta Baleg, juga sedang menyusun naskah akademik dalam kaitan dengan penyiapan RUU inisiatif yang menjadi porsi DPR untuk mempersiapkan dan selanjutnya diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

Kegiatan Fungsi Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat/ Umum Komisi IX DPR-RI dengan Dirjen BUK Kementerian Kesehatan, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta sejumlah direktur utama rumah sakit, membahas masalah terkait terjadinya malpraktek yang terjadi di tiga pelayanan kesehatan, yaitu RS. Medika Permata Hijau Jakarta, RS Ibu dan Anak Dedari Kupang dan RS Santa Elisabeth Medan. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa Komisi IX: [1] mendorong dan mendesak pihak kemenkes RI dan KKI melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran



Indonesia untuk segera memutuskan berbagai kasus dugaan kelalaian medik yang terjadi dengan seobjektif mungkin dan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [2] mendesak pihak Kemenkes RI dan KKI untuk melakukan sosialisasi terhadap prosedur bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan tentang kasus dugaan kelalaian medik yang dialaminya, termasuk dengan melakukan *up date* data di website KKI. [3] meminta laporan tertulis dari kemenkes RI terhadap proses yang sudah dicapai maupun perkembangan penyelesaian kasus ED di RS Ibu dan Anak Dedari Kupang, kasus MR di RS Medika Permata Hijau Jakarta dan kasus MS di RS Elisabeth Medan dengan perincian: kasus MS di RS Elisabeth Medan sudah selesai dan diserahkan pada 22 Januari 2013; kasus ED di RSIA Dedari Kupang paling lambat 15 Mei 2013; dan kasus MR di RS Medika Permata Hijau belum masuk di MKDKI.

[4] mendesak Kemenkes RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit sesuai dengan amanat UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, untuk meminimalisir kasus kelalaian medik di masa datang. [5] meminta



Kemenkes RI, IDI dan KKI untuk merumuskan strategi agar kualitas tenaga kesehatan, infrastruktur, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dalam rangka reformasi pelayanan kesehatan.

Kegiatan lain di bidang pengawasan, minggu ini Komisi IV mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Perum Bulog membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2012, evaluasi dan serapan APBN 2012 serta rencana kerja tahun 2013. RDP ini menyimpulkan antara lain bahwa Komisi IV: [1] mengapresiasi Perum Bulog atas realisasi penyaluran subsidi raskin APBN tahun 2012 (termasuk raskin ke-13) sebanyak 3.347.064 ton (98,94%), realisasi tambahan cadangan beras Pemerintah tahun 2012 sebanyak 266.667 ton dan realisasi penyaluran cadangan beras pemerintah sebanyak 210.477 ton, sehingga stok akhir cadangan beras pemerintah tahun 2012 sebanyak 434.640 ton. [2] mendukung komitmen Perum Bulog terhadap rencana pengadaan beras tahun 2013 sebanyak 3.550.000 ton yang berasal dari pengadaan beras dalam negeri. [3] meminta Perum Bulog untuk memberikan keterangan lengkap pada kemasan beras mengenai asal beras, tanggal produksi, dan berat bersih. [4] meminta Perum Bulog untuk segera melakukan sosialisasi terhadap UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pelaku penyelewengan pengadaan dan penyaluran pangan. [5] meminta Pemerintah untuk melakukan proses hukum terhadap para pelaku pelanggaran dan penyimpangan penyaluran raskin.

Penetapan Pejabat Publik

Pada minggu ini, Komisi III DPR yang mendapat tugas melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung 2012 telah mulai melaksanakan tugas. Hari senin 14 Januari, berturut-turut beberapa hari kedepan, dilakukan *fit and proper test* terhadap calon-calon Hakim Agung untuk tahun pertama. Ada 12 calon yang diuji, yang nantinya akan dipilih 4 terbaik diantaranya untuk menjadi Hakim Agung tahap kedua.

Berikutnya, Komisi III juga akan melakukan *fit and proper test* terhadap 12 calon lagi pada tahap kedua, yang akan dimulai pada 21 Januari. Dari 12 calon ini, nantinya juga akan ditetapkan 4 nama yang akan menjadi Calon Hakim Agung pada tahap kedua.

Keputusan Komisi III terhadap calon-calon yang terpilih, 4 calon pada tahap satu dan 4 calon pada tahap dua, akan ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2013, untuk selanjutnya sesuai dengan mekanisme Dewan akan diputuskan menjadi keputusan DPR melalui Rapat Paripurna yang waktunya akan ditentukan kemudian.

Konsultasi Pimpinan DPR

Minggu ini Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan BURT membahas masalah program Aspirasi Rakyat. Konsultasi ini diadakan sebagai tindak lanjut atas pidato Ketua DPR pada saat pembukaan Masa Persidangan III pada 7 Januari 2013 lalu. Program ini diharapkan dapat terealisasi, karena sisa waktu kegiatan DPR kurang dari dua tahun, sehingga waktu yang terbatas ini, benar-benar menjadi efektif apabila program Aspirasi Rakyat berhasil diwujudkan. Berkaitan dengan ini, maka rencana program ini disampaikan kepada Pemerintah, Menteri Keuangan dan Ketua BAPPENAS dalam forum konsultasi, untuk didalami lebih lanjut.

Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Komisi XI juga melakukan konsultasi dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Agenda yang dibahas adalah tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dan hubungan kelembagaan OJK dengan DPR-RI.

Kegiatan Fraksi dan Anggota DPR

Pada tanggal 14 Januari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan nomor urut partai-partai peserta Pemilu Legislatif 2014. Penetapan nomor urut partai politik dilakukan setelah KPU menetapkan 10 Partai Politik yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014. Kesepuluh Parpol tersebut adalah 9 yang telah duduk di DPR dan 1 partai baru yaitu Partai Nasional Demokrat.

Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu mendorong semangat Parpol untuk segera melakukan konsolidasi, melakukan rekrutmen bagi para anggotanya yang akan dicalonkan sebagai anggota legislatif 2014. Hal ini perlu dilakukan, mengingat masa kampanye Pemilu legislatif akan segera dimulai. Masing-masing Parpol yang telah memperoleh nomor urut dalam Pemilu 2014, memiliki kegairahan memperoleh nomor urut tersebut yang masing-masing menganggap bahwa nomor urut yang diterima adalah nomor urut yang terbaik. Namun demikian, Pimpinan Dewan senantiasa mengingatkan bahwa kegiatan persiapan Pemilu 2014, tidak boleh mengganggu kegiatan DPR sebagaimana yang diingatkan oleh Ketua DPR pada pembukaan sidang.

Suhu politik memang akan menghangat, namun diharapkan tidak akan terjadi gesekan-gesekan yang akan mengganggu perjalanan bangsa ke depan. Tahun 2013 adalah tahun dimana DPR harus benar-benar fokus pada tugas dan fungsinya, terutama pada fungsi legislasi. Ditahun 2013 inilah, Pimpinan mengharapkan kinerja legislasi ditangani dengan sebaik mungkin dalam rangka menjawab kritik masyarakat yang tajam terhadap kinerja Dewan.

Ketua DPR mengharapkan pada dua tahun kedepan, DPR harus bekerja keras dalam memenuhi amanat yang dipercayakan rakyat pada anggota DPR.

Diplomasi Parlemen

Kunjungan Delegasi DPR-RI ke Republik Sudan adalah dalam rangka menghadiri *the 8th Session of the PUIC Conference* di Khartoum Sudan, dari tanggal 17-22 Januari, dimana Indonesia pada saat ini tidak hanya sebagai anggota aktif PUIC, melainkan menjabat sebagai Presiden Konferensi ke-7 PUIC dan akan melepas masa jabatannya kepada Parlemen Republik Sudan.

Delegasi DPR-RI juga telah berperan aktif menyam-

paikan beberapa usulan *draft* resolusi untuk menjadi materi pembahasan dalam pertemuan PUIC di Sudan, disamping juga ada yang menjabat sebagai anggota *Executive Committee* yaitu KH. Surahman Hidayat dan *Chair of the First Conference of Muslim Women Parliamentarians* yaitu Dr. Nurhayati Ali Assegaf.

PUIC adalah organisasi bersama parlemen negara-negara Islam yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan silaturahmi dan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari antara parlemen negara-negara Islam atas berbagai persoalan atau isu yang tengah dialami umat Islam di dunia dan persoalan global pada umumnya.**

DPR DESAK KEMENKES SEGERA SELESAIKAN BERBAGAI KASUS MALPRAKTEK

Komisi IX DPR RI mendorong dan mendesak pihak Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, untuk segera memutuskan berbagai kasus dugaan kelalaian medik (malpraktek) yang terjadi dengan seobjektif mungkin dan memberikan sanksi kepada tenaga kesehatan di rumah sakit dan kepada rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf.

Demikian salah satu keputusan rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kemenkes Supriyantoro, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), KKI, Dirut RS Medika Permata Hijau Jakarta, Dirut RS Ibu dan Anak Dedari Kupang dan Dirut RS Santa Elisabet Medan di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1)

“Komisi IX juga mendesak pihak Kementerian Kesehatan RI dan Konsil Kedokteran Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap

prosedur bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan tentang kasus dugaan kelalaian medik yang dialaminya. Termasuk dengan melakukan *up date* data di website KKI,” kata Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf yang memimpin rapat tersebut.

Rapat yang dihadiri pula orangtua pasien RS Medika Permata Hijau, Muhamad Yunus dan orangtua pasien RS Dedari Kupang, Johnson Dethan dan Many Lynn, mendesak Kemenkes untuk meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit sesuai dengan amanat Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit untuk meminimalisir kasus kelalaian medik di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam rangka reformasi pelayanan kesehatan, Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes, IDI dan KKI untuk merumuskan strategi. Hal ini dimaksudkan agar kualitas tenaga kesehatan, infrastruktur, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan.

“Terkait adanya dugaan malpraktek di RS Medika Permata Hijau, RS Ibu dan Anak Dedari dan RS Santa Elisabet, kami minta laporan tertulis dari Kemenkes terhadap proses yang sudah dicapai maupun perkembangan penyelesaian kasus-kasus tersebut,” tegas Nova.

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI, Selasa (15/1) membahas mengenai malpraktek yang akhir-akhir ini kembali mencuat dan meresahkan masyarakat. (sc)foto:wy/parle.



Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Ukraina Tertarik Kerjasama di Bidang Migas



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Ketua GKSBI Ukraina-Indonesia Voldoymyr Vecherko.

Ukraina tertarik untuk meningkatkan kerjasama bisnis di bidang energi termasuk batubara dan migas. Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua DPR Pramono Anung menerima Ketua GKSBI Ukraina-Indonesia Voldoymyr Vecherko, di Gedung Nusantara III, Rabu, (16/1).

“Pertemuan ini tidak biasa karena delegasi Ukraina tertarik kerjasama dibidang industri khususnya energi, batubara dan migas,”katanyaseusai menerima parlemen Ukraina.

Menurutnya, Ukraina berke-

inginan mendorong hubungan kerjasama ke arah bisnis tidak hanya politik saja. “Pertemuan ini awal yang baik karena kita juga memiliki industri kelapa sawit yang nomor satu di dunia sementara Ukraina membutuhkannya,”paparnya.

Dia menambahkan, hubungan tidak hanya politik semata, tetapi kita semua mengharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua negara khususnya rakyat Indonesia maupun Ukraina.

“Sekarang ini Ukraina sedang

mengalami proses menuju negara maju, selain itu saya pribadi mendukung adanya benchmark harga gas bagi dunia,”paparnya.

Indonesia, lanjutnya, dapat meningkatkan kerjasama dengan Ukraina khususnya di bidang industri radar dan roket. karena memang negara Ukraina menguasai teknologi tersebut. “Kenapa tidak kita coba kerjasama dengan Ukraina dimana dulu menjadi andalan dari Uni Sovyet,”terangnya. (si), foto : eka hindra/parle/hr.

Komisi I Terima Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Finlandia

Komisi I DPR menerima delegasi Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Finlandia, membicarakan hubungan bilateral kedua negara dan bekerjasama dalam melaksanakan perdamaian dunia, di Gedung DPR RI, Rabu (16/1).

Parlemen Finlandia dipimpin Timo Soini, didampingi Jouni Backman, Pekka Haavisto, Mari Kiviniemi, Katri Komi, Maria Lohela, menyampaikan ketertarikan negara Finlandia untuk bekerja sama dengan Indonesia karena mempunyai pengaruh yang besar dalam Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, Parlemen Finlandia juga mempertanyakan perkembangan keamanan Aceh, keamanan Laut Cina Selatan, dan pandangan posisi Indonesia terhadap Myanmar.

Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin saat memimpin

pertemuan tersebut, menjelaskan Indonesia berprinsip dalam melaksanakan perdamaian tidak menghendaki adanya sebuah peperangan untuk menyelesaikan sebuah masalah. “Berprinsip melaksanakan perdamaian dunia dengan bebas aktif,” tegasnya.

Terkait persoalan Laut Cina Selatan, Indonesia mendorong adanya sebuah prosedur tetap solusi tanpa pengerahan pasukan militer, sehingga Parlemen Indonesia mendorong prosedur setiap gerakan-gerakan untuk menyelesaikan solusi. “Komisi I menghendaki semua negara harus mengikuti prosedur itu,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Mengenai keadaan berdemokrasi negara-negara lain seperti di Myanmar, tentunya Indonesia tidak ada keinginan untuk intervensi kepada negara tersebut. “Bukan intervensi, tetapi melakukan dialog yang



Komisi I DPR menerima delegasi Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Finlandia, yang dipimpin Timo Soini.

kemudian menimbulkan persepsi yang baik tentang berdemokrasi,” jelasnya.

Selain itu, TB. Hasanuddin, juga menjelaskan mengenai perkembangan keamanan di Aceh. Dia menerangkan bahwa kondisi Aceh saat ini aman

serta politik demokrasi dan perekonomian Aceh juga berjalan dengan baik. “Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam diberikan kewenangan untuk mengatur peraturannya melalui Peraturan Daerah,” jelasnya. (as)

Perubahan UU Keuangan Negara Harus Mampu Jamin Penyelenggaraan Keuangan Efektif-Efisien

DPR menginginkan RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dapat mewujudkan sebuah sistem penyelenggaraan keuangan negara yang efektif, efisien sesuai dengan prinsip *good governance* untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“RUU ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepada keuangan negara terkait dengan pendapatan negara yang diperoleh dalam sebuah perlindungan regulasi yang seaman mungkin tidak bisa dikorup.”



Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah didampingi anggota Baleg Abdul Hakim usai Rapat dengan Pimpinan PPAK Muhammad Yusuf.

demikian ungkap anggota Baleg Abdul Hakim pada rapat Panja RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di Ruang Rapat Baleg Gedung Nusantara I, Senin (14/1).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah tersebut menghadirkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf untuk memberikan masukan mengenai aturan terkait pencucian uang.

Pada kesempatan itu, PPATK juga diminta membantu memperkuat keuangan negara melalui kewenangannya maupun terkait di luar kewenangannya. Perlunya peraturan teknis mengenai pengalokasian dan kejelasan antara dana hibah dan dana sosial lainnya yang sering digunakan banyak pihak untuk melanggengkan kekuasaannya.

“PPATK sejak awal menangani transaksi yang terlaporkan mencurigakan dan *concern* terhadap perlunya pengaturan pembatasan transaksi tunai, namun pada prinsipnya PPATK bisa menyelidiki semua transaksi yang melalui perbankan,” kata Yusuf. (ray)/foto:iwan armanias/parle.

KOMISI IX DPR DESAK REFORMASI SISTEM KESEHATAN

Banyaknya kasus kelalaian medik membuat penataan sistem kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien perlu segera dilakukan. Dugaan kelalaian medik bisa dipicu kurangnya komunikasi, rendahnya kompetensi tenaga kesehatan, buruknya manajemen fasilitas layanan kesehatan, hingga lemahnya pengawasan.

Desakan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), keluarga korban, dan pengelola rumah sakit (RS) tempat dugaan kelalaian medik terjadi, Selasa (15/1)

Wakil Ketua Komisi IX, Nova Riyanti Yusuf yang memimpin rapat tersebut, mengatakan, bahwa kasus kelalaian medik yang terungkap umumnya melibatkan pasien dari kelompok ekonomi menengah atas. Pasien miskin lebih banyak pasrah.

Sementara, Anggota Komisi IX DPR Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG) menyatakan perlunya dokter dan RS mengedepankan empati pada pasien korban dugaan kelalaian medik. "Pasien datang untuk mencari kesembuhan dan dokter adalah manusia biasa yang bisa salah," katanya.

Jika ada dugaan kelalaian medik, kata Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran KKI M Toyibi, masyarakat dapat mengadu ke MKDKI-KKI atau ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)-IDI. Pelanggaran yang ditangani MKDKI menyangkut disiplin. Sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan STR sementara yang membuat dokter tak bisa praktik.

Pelanggaran yang ditangani MKEK terkait etika. Selain ke MKDKI dan MKEK, korban juga dapat mengadu ke polisi/pengadilan secara pidana atau perdata. Ketiga proses dapat berjalan simultan di ketiga lembaga.

Ketua MKDKI-KKI Ali Baziad mengatakan, pada



Anggota Komisi IX DPR Endang Agustini Syarwan Hamid (F-PG).

2006-2012 ada 183 pengaduan dugaan kelalaian medik. Namun, hanya 88 pengaduan yang dapat diproses dan melibatkan 121 dokter. "Kurangnya komunikasi dokter dan pasien memunculkan banyak ketidakpuasan layanan," katanya.

Dari 121 dokter itu, hanya 57 orang yang terbukti melanggar disiplin. Dari jumlah itu, hanya 26 dokter yang dicabut sementara STR-nya. Jika tak kompeten, dokter sebaiknya merujuk.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia NTT Marthen L Mullik mengatakan, kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dipicu buruknya manajemen RS. Karena itu, RS tempat terjadinya pelanggaran juga perlu mendapat sanksi dan pembinaan.

Menyikapi terus adanya kasus kelalaian medik, Ketua Umum IDI Zaenal Abidin mengatakan pentingnya pembinaan tenaga kesehatan oleh setiap organisasi profesi dan pemerintah, baik dalam persoalan etika, disiplin, maupun kompetensi. "Dokter juga dilindungi hukum saat bekerja sesuai standar profesi," katanya.

Dugaan kelalaian medik yang dibahas dalam RDP dan RDP Umum adalah kasus RAP (10) di RS Medika Permata Hijau, Jakarta. Setelah menjalani operasi usus buntu yang dilakukan secara mendadak tanpa pendapat kedua (second opinion) dari dokter lain, 22 September 2012, pasien kini tak bisa melihat, bicara, mendengar, ataupun merespons. Pengelola RS mengatakan, pasien mengalami alergi obat sehingga denyut jantung sempat terhenti.

Kasus lain menimpa EMD (10 bulan) di RS Ibu dan

Anak Dedari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah operasi kasus invaginasi usus (masuknya bagian pangkal usus ke ujung usus), korban mendapat transfusi darah langsung ke vena. Setelah itu, fungsi napas pasien turun dan akhirnya meninggal akibat perdarahan di seluruh organ tubuh.

Kasus lain terjadi pada MS (52) di RS Santa Elisabeth, Medan, Sumatera Utara. Setelah dikuret karena

pendarahan di luar menstruasi dan dugaan adanya kista, kandung kemih pasien tersayat hingga kencing tak bisa dikontrol. Setelah dirawat di RS lain, kini pasien harus kencing melalui kateter yang dipasang permanen di ginjal. MKDKI memutuskan ada kelalaian medik dan KKI sudah mencabut surat tanda registrasi (STR) dokter yang pertama melakukan operasi selama dua bulan. (sc)

Program BSPS Kemenpera Tidak Optimal



Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz membahas evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Komisi V DPR menilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum optimal dan tepat sasaran. Pasalnya, sebaran bantuan tidak merata dan memiliki kriteria yang jelas.

“Ukuran menentukan lokasi rumah swadaya ini belum ada standar yang jelas, DKI dapat 380 titik, Kaltim bisa 301 titik, coba bandingkan Maluku mendapat 800 rumah, Papua 1200 rumah,” ujar Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS saat Raker dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, membahas evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa, (15/1).

Menurut Sigit, dirinya pesimis pemerintah dapat menyelesaikan kekurangan rumah (*backlog*) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. “Prinsipnya DPR mendukung program mengurangi kemiskinan ini, namun harus dilihat sebarannya juga,” paparnya.

Dia menambahkan, Pemerintah harus memangkas struktur birokrasi yang ada. Artinya, verifikasi dari pemerintah daerah di daerah menambah jejang tugas. “Kita mengusulkan kenapa usulan tidak langsung ke pusat saja,” ujarnya.

Sementara Teguh Juwarno dari F-PAN menyayangkan, tidak adanya sinergi antara Kemenpera dengan DPR sebagai wakil rakyat. Diakuinya, lanjut Teguh, sebagai Wakil rakyat tentunya memahami lokasi Dapilnya, dan masyarakat yang layak menerimanya. “Jika memang tidak ada sinergi kedepan Komisi V DPR jangan terlalu mudah memberikan persetujuan terhadap anggaran Kemenpera,” tegasnya.

Kemenpera telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga 26 Desember 2012 lalu dari total target pembangunan fisik sekitar 250 ribu unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 18.159 unit

atau 90,9 persen serta stimulan peningkatan kualitas perumahan terealisasi sekitar 230 ribu atau 100 persen.

Dari sisi bantuan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan dananya sekitar Rp7,103 triliun untuk sekitar 133.000 unit rumah berhasil direalisasikan sebanyak 73.923 unit rumah dengan total anggaran Rp 3,033 triliun. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo (F-PKS).

Komisi X DPR Belum Siap Menerima Kurikulum 2013



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.

Secara jujur Komisi X DPR sampai saat ini belum siap menerima kurikulum baru 2013, namun demikian masih memahami keadaan dan kondisi seperti ini. Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim di Gedung DPR Senayan Selasa (15/1) siang.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adiyanto, Ferdiansyah mengatakan, sampai saat ini Komisi X DPR belum menerima bahan dalam bentuk tulisan mengenai kurikulum serta *grand designnya*, yang selama ini diterima hanya dalam bentuk paparan dan *power point* saja.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan kembali, hingga detik ini belum tahu dalam bentuk apa yuridisnya, filosofinya apa, sosiologisnya apa, dan teoritisnya juga apa ini yang perlu diketahui.

“Panja kurikulum ini bukan merupakan hal yang baru terutama bagi seseorang pengamat yang memang mendalami di bidang pendidikan serta konsen secara komprehensif, pasti sudah dapat mendalaminya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Panja Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KSTP) juga pernah dilakukan Komisi X DPR pada periode tahun 2004-2009 dan itu diputuskan pada bulan 8 Juli 2008, walaupun hal itu tidak ada hubungannya antar periode yang lalu dengan periode yang sekarang.

Tetapi sambungnya, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Panja KSTP pada 8 Juli 2008 masih banyak yang belum dilakukan diantaranya adalah revisi PP No. 19. “ Itu yang paling prinsip dan mendasar, maka kami menanyakan landasan yuridisnya itu apa,” tegas Ferdi.

Pasal 38 UU No.20 tahun 2003, jelas Ferdi, mengatur kewenangan pemerintah, tapi jika dibaca secara utuh UU No. 20 tahun 2003 terutama pasal 8, ada hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat berhak dan berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

Masih kata Ferdiansyah, Mendikbud sendiri sudah mengakui kalau dokumen kurikulum itu belum selesai,



Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah (F-PG).

dan masih dikerjakan. “Jadi bagaimana Panja bisa bekerja, sementara dokumennya saja belum selesai dan belum diterima di Komisi X DPR,” tukasnya.

Dia mengakui sudah melakukan survey kepada 300 guru, pengawas dan kepala sekolah di Jakarta. Dari 300 kuisioner yang kembali 282, dari jumlah ini 80% bingung karena belum tahu dan terinformasikan. Guru-guru di tingkat pusatpun belum tahu kurikulum baru seperti apa.

Tapi ada pernyataan menarik bahwa ini bukan kurikulum baru tetapi pengembangan kurikulum sementara informasi yang pertama kebijakan nasional

tidak pernah dilakukan secara perenungan oleh para guru. “Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila tidak ada resistensi, artinya tidak ada komunikasi yang baik antara komunikator dengan komunikator,” tegasnya lagi.

Jadi lanjut Ferdi, jangan salahkan masyarakat dan jangan salahkan rakyat jika terjadi resistensi. Juga jangan salahkan Dewan mengapa terjadi keresahan maka DPR bersuara. “Selama masih ada resistensi yang cukup besar terhadap masalah kurikulum ini, kami tetap akan bersuara,” tandas Ferdiansyah. (Spy). foto:wy/parle.

Komisi IV Ingin Pemerintah Tidak Impor Beras Tahun 2013



Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam (F-PKB).

Komisi IV DPR menginginkan pada Tahun 2013 Pemerintah tidak melakukan impor beras, karena perkiraan penyerapan beras dalam negeri turun dibanding dengan 2012 turun. “Jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) turun juga sehingga pengadaan beras dalam negeri turun, diharapkan tidak ada kebijakan impor beras,” tegas Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam, di Gedung DPR, Senin (14/1).

Dia mengatakan Komisi IV selalu memper-tanyakan dasar pemerintah dalam melakukan kebijakan impor beras, padahal menurutnya keadaan beras dalam negeri surplus. “Kita terus komplain kepada pemerintah untuk jangan impor, karena beras kita cukup, Tetapi faktanya pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk impor,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Oleh karena itu, menurut Ibnu harus ada fleksibilitas harga pembelian oleh bulog. Bulog diikat oleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam rangka pengadaan beras dalam negeri. Padahal beras dipasar harganya diatas HPP sehingga walaupun banyak beras tetapi Bulog tidak bisa menyerap. “Untuk itu ditekankan harus ada fleksibilitas harga untuk pembelian beras masyarakat pada tahun 2013 agar Bulog bisa melakukan akselerasi untuk melakukan pembelian beras dalam negeri,” tegasnya.

Selain itu, terkait pelabelan pada karung beras Bulog menurutnya merupakan syarat karena akan bisa ditelusuri asal beras. Dalam rangka pengadaan Bulog tidak melakukan sendiri tetapi melakukan mitra dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berhati-hati dalam meluncurkan berasnya. Maka harus dicantumkan yang memproduksi, tanggal produksi dan kadaluwarsanya. “Ini untuk menjamin kualitas beras Bulog, agar ketika masyarakat menerima beras tidak bagus maka dapat dilacak produsennya,” jelas Ibnu Multazam. (as) foto:wy/parle.

Pimpinan DPR Tegaskan Daming Tidak Layak Jadi Hakim Agung

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo menyatakan calon Hakim Agung Daming Sanusi tidak layak menjadi Hakim Agung karena kurang menghargai hak asasi kaum perempuan.

Menurut Pramono Anung ketika ditanya wartawan menegaskan, pernyataan Daming Sanusi soal pemerkosa dan korban perkosaan saling menikmati sangat menyinggung dan tidak menghargai hak asasi kaum perempuan.

“Saya akan mengusulkan kepada anggota Komisi III DPR agar Daming Sanusi tidak diproses sebagai Hakim Agung, dan pernyataan yang disampaikan Daming Sanusi pada forum uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI, adalah forum resmi dan tidak main-main,” kata Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (15/1).



Calon Hakim Agung Daming Sanusi.

Ia menambahkan, forum uji kepatutan dan kelayakan tersebut adalah forum resmi dan penentuan seseorang apakah terpilih atau tidak menjadi Hakim Agung, “Meskipun ia (*Daming-red*) menyatakan bahwa pernyataannya tersebut hanya bercanda, tapi tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai bercanda, karena forum uji kelayakan dan kepatutan

tersebut adalah forum resmi,” tegasnya

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, bahwa dirinya tidak melihat langsung proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut tapi tahu setelah membaca berita-berita di media massa. Namun ia akan mengkonfirmasi hal itu kepada anggota Fraksi PDIP yang berada di Komisi III. “Jika benar, maka Fraksi PDIP akan memberikan peringatan keras,” terangnya.

Sebelumnya, pada uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung di Komisi III DPR RI, Senin, (14/1), calon Hakim Agung Daming Sanusi menyatakan, hukuman mati tidak layak diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan, karena pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati.

Sementara itu di waktu yang berbeda, Wakil Ketua Priyo Budi Santoso mengatakan, bahwa calon Hakim Agung Daming Sanusi akan sulit untuk terpilih sebagai Hakim Agung karena melontarkan pernyataan yang menyinggung kaum perempuan.

“Pernyataan Daming Sanusi tersebut adalah pernyataan yang blunder dan menyinggung kaum perempuan,” tegasnya. Ia menambahkan, meskipun pernyataan Daming hanya bercanda tapi hal itu tidak tepat, karena ia melon-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

tarkannya pada forum uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung, dimana dirinya sedang diuji untuk menjadi Hakim Agung.

“Saat ini persoalan perkosaan sedang sensitif baik di Indonesia maupun di dunia internasional, menyusul kasus perkosaan terhadap murid sekolah dasar di Jakarta, berinisial RI,” jelasnya. Menurutnya ia menyakini, Komisi III DPR RI akan mempertimbangkan lagi untuk meloloskan Daming Sanusi.

“Meskipun Daming Sanusi mungkin sebelumnya memiliki reputasi tapi hal itu menjadi terhapus dengan pernyataannya yang blunder dan saya kira, Daming akan sulit untuk terpilih menjadi Hakim Agung,” terangnya.

Selanjutnya, Priyo mengimbau kepada semua pihak, khususnya kepada calon Hakim Agung, untuk menjaga dan menghargai etika dalam berbicara. (nt), foto : eka hindra/parle/hr.

Komisi I Minta Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU Perjanjian Internasional



Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita.

Komisi I meminta Pemerintah segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) draf usul inisiatif DPR terhadap RUU Pengganti UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. “Sejauh ini pihak pemerintah belum juga menyerahkan DIM,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung Nusantara II DPR RI, (15/1). saat memimpin RDPU guna mendapatkan masukan dari kalangan akademisi.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, UU Nomor 24/2000 tentang Perjanjian Internasional memang perlu segera dilakukan perubahan, karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Namun pembahasannya harus dilakukan dengan hati-hati. “Perjanjian internasional yang melibatkan pemerintah RI, jangan sampai merugikan bangsa dan negara Indonesia,” ungkap Agus Gumiwang.

Menurut perwakilan dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran, Universitas Parahyangan, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Nasional, RUU ini penting demi sempurnanya dalam upaya revisi dan pembahasan RUU Perjanjian Internasional, karena banyak sekali kelemahan.

Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Sidarto Danusubroto mengatakan, Perjanjian Internasional yang menyangkut mengenai kedaulatan, keamanan, sesungguhnya DPR

harus dilibatkan. Dia mencontohkan Perjanjian mengenai Ekstradisi dengan Singapura yang juga termasuk perjanjian pertahanan, dengan meminta 60 Ha di Batu- raja untuk latihan militer Singapura. “Perjanjian itu telah diteken Pemerintah, namun DPR tidak dilibatkan dan hingga saat ini ditolak DPR,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I Evita Nursanty (F-PDIP) mengatakan revisi ini penting karena banyak perjanjian internasional yang mempunyai kekurangan dan merugikan kepentingan nasional. “Diharapkan agar perjanjian internasional ke depan tidak merugikan kepentingan nasional, contohnya ACFTA,” paparnya.

Selanjutnya dia memandang Perjanjian Internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah perlu di dalam dengan sungguh-sungguh, karena hal-hal yang berkaitan dengan politik, keamanan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. (as)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi XI DPR Apresiasi Kinerja Ekonomi 2012



Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta (F-PDI Perjuangan).

Komisi XI DPR mengapresiasi positif kinerja pemerintah di sektor ekonomi pada tahun 2012 lalu. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi terjaga, sementara inflasi dapat terkendali di tahun tersebut. Namun DPR mendesak Kementerian Keuangan untuk menggenjot sektor pendapatan negara yang belum tergalai secara maksimal.

“Mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dipertahankan pada tahun 2013 ini,” harap anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Arif Budimanta saat Raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Gubernur BI Darmin Nasution, dan Menteri Bappenas Armida Alisjahbana, yang dipimpin oleh



Suasana Rapat Kerja Komisi XI dengan Menkeu, Gubernur BI dan Bappenas.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin, (14/1).

Arif mengatakan, secara *inlook* belanja pemerintah pusat cenderung positif selain subsidi dimana terjadi peningkatan pembayaran bunga utang sebesar 91,8 persen merupakan pembayaran utang luar negeri. “Sementara dalam sektor perpajakan kita mengalami kekurangan penerimaan 30 Triliun selain itu perlu ditingkatkan penerimaan di sektor bea cukai dimana bisa ditingkatkan penerimaan sektor itu,” ujarnya.

Menurutnya, terkait importasi barang mewah perlu ada mekanisme yang jelas terkait produk barang mewah itu. “kita mempertanyakan mekanismenya seperti apa, apa mereka sudah bayar apa belum itu yang menjadi persoalan,” paparnya.

Dia menambahkan, Bapenas, dalam kebijakan fiskalnya belum terlihat mampu menjaga harga kebutuhan pokok khususnya yang *volatile food*, selain itu bunga juga tidak mengalami penurunan. “insentif fiskal yang tidak kena sasaran ini kedepan juga harus lebih diseriusi oleh pemerintah,” tambahnya.

Halsenadadisampaikan oleh Ismet Ahmad (F-PAN), dia mengapresiasi positif *performance* pemerintah pada tahun 2012. “Pertumbuhan membaik meskipun pertumbuhan ekonomi global masih cenderung memburuk,” ujarnya.

Hal yang harus diperhatikan, lanjutnya, yaitu semakin besarnya gap kaya dan miskin yang semakin melebar, sementara stabilitas bagus dan inflasi terkendali. “Perekonomian kita masih menyimpan suatu ketidakstabilan dimana

employment elastisitas melemah dimana seharusnya bisa mencapai 400 ribu namun dibawah 200 ribu,” terangnya.

Pertumbuhan 2012 lalu, lanjutnya, lebih ditandai dengan Kosumsi domestik. “Hal ini yang kita lihat adanya ketidakstabilan, karena memang investasi kecil karena menghambat agregat suplai, yang menyebabkan inflasi di tahun berikutnya,” ujarnya. perlu adanya operasi pasar dari BI dimasa mendatang.

Menurutnya, defisit perdagangan semakin besar dimana impor lebih besar dibandingkan ekspor. Karena itu perlu didorong peningkatan produktivitas ekonomi khusus perbaikan sektor real. (si)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Serahkan Wewenang BBM Bersubsidi Kepada Pemerintah

Jatah atau kuota BBM subsidi tahun 2013 yang mencapai 46 juta KL diprediksi bakal “rontok” lagi, apabila tidak ada tindakan pengendalian BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

“Jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi, tidak perlu

izin ke DPR. Pasalnya, persetujuan sudah diberikan pada UU APBN 2013, jadi tidak perlu konsultasi. Inikan keputusan pemerintah domainnya, keputusan DPR pasti setuju,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis saat pembahasan *Outlook* Perekonomian Indonesia 2013

di Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Dia menjelaskan, DPR telah menyerahkan sepenuhnya harga BBM subsidi kepada pemerintah. “Jika tidak dinaikkan tentunya akan memberikan beban kepada pemerintah yang akan datang, karena itu



Wakil Ketua komisi XI DPR Harry Azhar Azis saat pembahasan Outlook Perekonomian Indonesia 2013.

sekarang itu jangan memberikan beban, tugas pemerintah,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah cenderung akan menaikkan BBM, karena memang resiko sudah diketahui jika tidak dinaikkan. “Saya pikir Menkeu sudah paham inti dari soal beban APBN, kalau tidak maka kemungkinan yaitu pemotongan gaji pegawai, atau menambah utang,” tambahnya.

Sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution sempat menyatakan kekhawatirannya terhadap konsumsi BBM bersubsidi yang tahun lalu telah melebihi kuota 40 juta Kiloliter. Karena dampaknya

dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan berdampak memperbesar defisit transaksi berjalan.

Darmin mengatakan, penyebab rupiah bisa melemah dikarenakan peningkatan konsumsi BBM subsidi di tengah menurunnya produksi minyak Indonesia yang terus mendorong peningkatan impor minyak.

“Hal ini memperbesar defisit transaksi berjalan, tentunya berdampak pada beban subsidi dalam APBN. Persepsi negatif secara otomatis akan mengganggu keuangan negara,” tambahnya. (si)/ foto:iwan armanias/parle.



Komisi III DPR menerima masukan dari Satuan Tugas Perlindungan Anak (STPA) terkait Fit and Proper Test Calon Hakim Agung.

STPA Minta Komisi III Tidak Loloskan Hakim Daming Sanusi

Komisi III DPR RI menerima aspirasi sejumlah LSM tergabung dalam Satuan Tugas Perlindungan Anak - STPA yang menolak calon hakim agung Daming Sanusi. Bagi mereka pernyataan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyebut korban dan pemerkosa sama-sama menikmati telah melukai perasaan rakyat Indonesia terutama korban perkosaan.

“Kami meminta DPR tidak meloloskan hakim Daming Sanusi menjadi hakim agung karena telah

melukai perasaan rakyat. MA juga sudah sepatutnya mencopot Daming dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi,” kata juru bicara STPA Ilma Sovri Yanti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum - RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/13).

Ia menambahkan Daming sebagai Ketua Pengadilan Tinggi sudah mendapatkan kenaikan gaji. Total penghasilannya yang nota bene dari uang rakyat saat ini sebesar Rp.45juta, tetapi perkataannya

selaku hakim tidak memiliki perspektif korban. STPA juga mengimbau agar masyarakat melaporkan apabila ada aparat penegak hukum melecehkan atau menyakiti perasaan korban dan keluarga.

Menjawab hal ini Wakil Ketua Komisi III Almuzammil Yusuf menjelaskan pernyataan Daming Sanusi disampaikan dalam forum *fit and proper test* calon hakim agung. Dalam forum terbuka tersebut diharapkan dapat digali pemikiran kandidat.

Ia secara khusus menekankan kenapa ada anggota Komisi III yang tertawa setelah mendengar pernyataan Daming. “Ada memang yang tertawa tapi tidak semua. Itupun menertawakan kenafian calon yang menyampaikan pendapat yang tidak pantas,” ungkapnya.

Terkait aspirasi pemberhentian Daming sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, ia menyebut akan meneruskannya dalam rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena dua lembaga ini yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran etik hakim. Politisi PKS ini menambahkan langkah segera yang

dapat dilakukan adalah meminta sekretariat Komisi III meneruskan aspirasi yang disampaikan STPA kepada MA dan KY.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota menyatakan persetujuan tidak akan meloloskan Daming. Mereka adalah Himmatul Alyah Setiawaty dari Fraksi Partai Demokrat, Taslim dari Fraksi PAN dan Nudirman Munir dari Fraksi Partai Golkar. “Saya akan memperjuangkan agar fraksi menolak kandidat ini karena kita nilai orang ini tidak patut,” demikian Nudirman. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.



Sutrisno warga Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Komisi III Dukung Sutrisno Perjuangkan Keadilan

Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika memberikan apresiasi kepada Sutrisno warga Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Usia tidak lagi muda 67 tahun, tetapi semangatnya memperjuangkan keadilan, melawan kezoliman yang diterimanya telah membuka mata banyak orang.

“Semangat bapak mencari keadilan telah memberi spirit bagi kami yang ada di Komisi III. Kami akan ikut bersama bapak memperjuangkan itu, jadi kalau memang ada perilaku aparat penegak hukum yang menyimpang di daerah bapak, kewajiban kami untuk melakukan pengawasan,” kata Pasek dalam RDPU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/13).

Dukungan juga disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani yang langsung mengusulkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke rumah Sutrisno. “Saya kira orang yang dizolimi itu wajib hukumnya kita lindungi. Kita prihatin apalagi waktunya sudah cukup lama, untuk mendalami masalahnya saya mengusulkan kita melakukan kunjungan spesifik ke daerah Pak Sutrisno ini,” tandasnya.

Sebelumnya Sutrisno menjelaskan pada pertengahan Juli 1998 bersama sejumlah warga lain melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oknum aparat Pemerintahan Desa Kalangan ke DPRD Klaten. Setelah melapor beragam intimidasi dan kekerasan menderanya yang didukung oleh oknum aparat desa bahkan polisi.

“Mereka mengancam membunuh saya. Rumah dan

kebudaya saya dihancurkan sampai rata tanah oleh sejumlah preman bersenjata yang dikoordinir oleh oknum polisi. Setelah melakukan aksi kekerasan para preman ini dijamu oleh oknum aparat desa di kantornya,” papar Sutrisno yang datang ke DPR didampingi istri dan 4 orang cucunya.

Ia mengaku telah menempuh jalur hukum, namun sejauh ini peradilan yang telah berlangsung belum menjerat pelaku dan oknum polisi yang telah merampas haknya. Laporan ke Mapolres Klaten bahkan ke Mabes Polri telah disampaikan tetapi sejauh ini belum ada tindak lanjut. Akhir tahun 2012 lalu ia memilih berjalan kaki dari Klaten ke Jakarta mengadu ke Komnas HAM, Presiden RI dan DPR RI. “Saya hanya mencari keadilan,” tandasnya. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.



Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.

Komisi II DPR: Pemerintah Tidak Konsisten Soal Data Honorer



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Komisi II DPR menilai ada ketidak konsistenan antara tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan verifikasi validasi (verval) tahap satu data honorer yang dianulir pemerintah.

“Ini aneh, saat pengumuman 30 Maret 2012 banyak daerah dinyatakan lolos, tapi kemudian setelah *quality assurance* (QA), malah tidak muncul sama sekali,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo dalam rapat dengar pen-

dapat dengan WamenPAN&RB, Kepala BKN, dan Kepala BPKP, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1).

Ganjar mencontohkan Kabupaten Purbalingga yang dalam uji publik disebutkan ada 194 honorer K1 memenuhi kriteria (MK). Anehnya pada Desember 2012, nama honorer K1 Purbalingga tidak muncul sama sekali.

“Kok bisa hilang nama-namanya padahal yang melakukan verval ada tim itu juga. Kalau saya katakan, ini datanya tidak valid makanya muncul banyak masalah,” ujarnya.

Menjawab soal itu, WamenPAN&RB Eko Prasjo mengakui ketidak cermatan pemerintah saat verval tahap satu. Ketidakcermatan itulah yang menyebabkan banyak complain atas data tersebut.

“Kami akui pemerintah kurang cermat dalam penanganan verval pertama. Ini karena keterbatasan waktu, anggaran, dan SDM. Itu sebabnya, MenPAN&RB kemudian memintakan BPKP untuk melakukan QA, audit tujuan tertentu (ATT), dan verval tahap dua,” ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, hasil QA, ATT, dan verval tahap dua dapat dipertanggungjawabkan karena secara institusi BPKP turun langsung. Berbeda dengan verval tahap satu, BPKP hanya diperbantukan saja di BKN untuk memeriksa dokumen.

“Sejak Agustus 2012, BPKP langsung melakukan pemeriksaan dan hasilnya ada 52 ribuan honorer K1 dari total 72 ribu yang clear. Sisanya masih diperiksa BPKP,” ujarnya.

Pengakuan ketidakcermatan pemerintah ini, langsung diapresiasi Komisi II DPR. Hanya saja kata Ganjar, ketidakcermatan pemerintah ini telah merugikan publik karena merasa dibohongi.

“Kalau posisi saya ada di atas bapak-bapak pejabat ini, anda akan saya berikan sanksi. Sebab, ketidakcermatan Anda semua menunjukkan kerja pemerintah tidak profesional,” tegas Ganjar. (nt), foto : wd/parle/hr.

DPR Setujui Pelaksanaan Sosialisasi RUU ASN

Komisi II DPR menerima dan menyetujui kepada pihak Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan sosialisasi pada tanggal 22 Januari 2013 dikalangan pemerintahan dan sekaligus melaporkan paparan perkembangan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dihadapan Presiden di akhir Januari 2013.



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat Panja RUU ASN melakukan RDP dengan Sesmenpan-RB Tasdik Kinanto di DPR, Jakarta, Kamis, (17/1).

“Kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk mengadakan sosialisasi di internal pemerintahan pada tanggal 22 Januari 2013, dan

melaporkan hasil substansi dari perkembangan semuanya itu ke Presiden,” kata Agun.

Namun menurut politis dari Partai Golkar ini berharap, substansi yang disosialisasikan termasuk paparan di hadapan Presiden apakah juga mencakup seluruh perkembangan yang ada dalam pembahasan RUU ASN ini,

“Karena kalau tiba-tiba yang dilaporkan barang atau bendanya berbeda artinya akan menimbulkan problem pembahasan ulang dari awal lagi, itu akan menjadi kendala,” jelasnya.

Namun, harap Agun, DPR masih memberikan apresiasi, jika sosialisasi di kalangan pemerintahan termasuk paparan di hadapan Presiden bisa terlaksana selambat-lambatnya di akhir Januari 2013, namun dengan catatan penjadwalan ini tidak dimundurkan lagi agar target didalam masa sidang ini RUU ASN bisa dituntaskan.

Ia menambahkan, terhadap materi sosialisasi yang dilakukan termasuk juga paparan yang disampaikan kepada Presiden berkenaan dengan RUU ASN ini, adalah substansi materi yang tidak terputus dan terkait secara langsung serta merupakan bagian dari proses pembahasan RUU ASN, bukan merupakan sesuatu hal yang tiba-tiba muncul, tapi merupakan produk dari hasil proses pembahasan substansi yang dilakukan lewat rapat-rapat kerja dan Panja antara Kementerian PAN dan RB bersama Komisi II DPR.

“Substansi materi yang akan dipaparkan dihadapan Presiden adalah buah karya dari hasil perkembangan dan pembahasan sampai dengan posisi terakhir saat rapat DPR bersama pemerintah, serta sampai adanya workshop bedah RUU ASN yang melibatkan sejumlah pakar Perguruan Tinggi dan melibatkan seluruh stakeholder pusat dan daerah,” tegasnya.

Menurut anggota Komisi II DPR Azhar Romli (F-PG), DPR menyambut baik dengan adanya sosialisasi ini dan hal-hal substansi yang memang harus dibawa kepada Presiden.

Senada dengan yang disampaikan oleh Azhar Romli, Abdul Gafar Patappe (F-PD) juga mengharapkan Ke-

menterian PAN dan RB untuk bisa memberikan gambaran sebelum substansi materi di sosialisasikan.

Menanggapi hal tersebut, Sesmenpan-RB Tasdik Kinanto menjelaskan, bahwa pihaknya sangat memperhatikan sekali atas apa yang telah disampaikan, namun demikian, jelasnya, sebenarnya dalam RDP kali ini, pihaknya ingin menyampaikan perkembangan terakhir mengenai proses pembahasan di tingkat pemerintah serta ada agenda dari Kementerian PAN dan RB akan melakukan sosialisasi tanggal 22 Januari 2013 dengan seluruh Kementerian, dan yang terakhir pada akhir bulan Januari sesuai dengan kesepakatan bersama Wapres, sudah ada sidang terbatas.

“Selanjutnya, menyangkut substansi perkembangan hasil pembahasan juga sudah ada, sebagai contoh, misalnya ada perubahan dan kesepakatan yang signifikan di Internal pemerintahan yakni mengenai seluruh pengaturan kepegawaian yang ada di UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekarang ini mengatur juga masalah kepegawaian, Mendagri setuju itu dialihkan menjadi RUU ASN, dan menjadi muatan dalam RUU ASN,” jelas Tasdik.

Tasdik menambahkan, pengalihan itu agar ada kodefikasi peraturan perundangan di bidang kepegawaian dan hanya satu yaitu UU ASN, “Itu satu perubahan dan kesepakatan yang signifikan, dan hal itu Pak Mendagri sendiri yang menghendaki seperti itu,” jelasnya. (nt)



Anggota Komisi II DPR Abdul Gafar Patappe (F-PD).

Komisi IV Minta Kementerian Pertanian Tingkatkan Kinerja Tahun 2013

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja atas serapan APBN Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pertanian sebesar Rp.18,248.Triliun atau 92,86% dari total pagu APBN. “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar lebih meningkatkan kinerja dan serapan APBN Tahun Anggaran 2013,” kata Wakil Ketua Herman Khaeron.

Ketika memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Suswono, Rabu (16/1) Herman juga meminta Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri Pertanian sebagai payung hukum untuk mendukung pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya Kementerian Pertanian diminta untuk segera melakukan sosialisasi terhadap UU tentang Pangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam mengatakan kepada PARLENTARIA, untuk mencapai swasembada pangan, baik itu swasembada daging, kedelai, jagung dan lain sebagainya kuncinya adalah harga, yaitu harga yang menguntungkan bagi petani dan peternak. “Jika harga menguntungkan bagi mereka, maka semangat untuk melakukan kegiatan bertani, bercocok tanam, dan beternak akan muncul secara mandiri,” katanya.



Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Lebih lanjut, Ibnu menyampaikan selama ini basis dari swasembada hanya berupa bantuan-bantuan, sehingga dari sisi harga harus distabilkan supaya peternak bisa menghitung kemungkinan keuntungan dan kemungkinan kerugian.

Pemantauannya, hari ini sudah bagus dengan naiknya harga hewan ternak dipasaran akibat bersama-sama mengurangi impor. Hal ini memicu semangat petani untuk beternak kembali, sehingga populasi beternak kecenderungannya naik. “Pemerintah supaya tidak

menambah kuota impor baik daging maupun ternak lagi untuk menjaga semangat dari masyarakat untuk beternak kembali terjaga,” harapnya.

Selanjutnya, Ibnu menegaskan mengenai Pakan yang merupakan komponen sangat penting bagi swasembada daging, suatu yang tidak rasional kalau pakan itu sulit dan mahal. “Pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi munculnya pakan yang murah, pakan yang mudah dan pakan yang berkualitas,” tambahnya. (as/nt), foto : wd/parle/hr.

Pakar Kelautan Nilai Potensi Kepulauan Indonesia Minim Perhatian



Ketua Pansus PPDK Alex Litaay mengundang para pakar kelautan.

Potensi pembangunan yang besar dan beragam di pulau kecil belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh pemerintah. Pendapat itu disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri saat Pansus RUU PPDK yang dipimpin oleh Ketua Pansus PPDK Alex Litaay mengadakan RDPU dengan para pakar kelautan, di Gedung Pansus, Rabu sore, (16/1).

“Kalaupun ada kegiatan pembangunan ekonomi di pulau kecil pada umumnya bersifat ekstraktif dan dilakukan serta untuk kepentingan korporasi asing dan pemilik modal besar,”ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pembangunan politik-ekonomi berupa alokasi anggaran penyediaan kredit perbankan, pembangunan infrastruktur, teknologi, pembangunan SDM, dan aset ekonomi produktif lain-

nya sangat tidak pro daerah kepulauan. “Ini berakibat daerah kepulauan sebagian besar merupakan daerah tertinggal dan miskin,”paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus segera membangun aksesibilitas, infrastruktur, energi, iklim investasi yang atraktif dan kondusif, regulasi yang jelas, tegas dan adil serta SDM. “Swasta dan masyarakat investasi di modal kerja (*working capital*) dan taat peraturan,”paparnya.

Pakar Kelautan Aji Sularso mengatakan, ekosistem pulau-pulau kecil memiliki potensi hayati dan non hayati yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional. “kita melihat terdapat indikasi kecenderungan okupasi dan bahkan *claim* kepemilikan pulau-pulau kecil oleh berbagai pihak,”ungkapnya.

Menurutnya, diperlukan pemantauan dan pengawasan atas keberadaan dan keadaan pulau-pulau kecil terluar. (si), foto : nt/parle/hr.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Dalam yudisium yang dibacakan Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Ganjar Kurnia, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude dalam sidang promosi doktor di bidang ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. “Kami menyatakan bahwa gelar doktor dengan yudisium *cum laude*,” kata Ganjar yang juga Rektor Unpad di Aula Unpad, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Jumat (11/1).

Dalam sidang Pramono mempertahankan disertasi-nya yang berjudul “Komunikasi Politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif Terhadap Konstituen Studi Interpretif Pemilu 2009”, dihadapan tim promotor Deddy Mulyana, Engkus Kuswarno, dan Soleh Soemirat.

“Objek penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan latar belakang, konsep diri, motivasi, pemaknaan, strategi komunikasi dan hambatan, peluang serta keunikan komunikasi politik,” kata Pramono Anung.

Dalam sidang promosi doktor tersebut dihadiri oleh puluhan tokoh nasional, antara lain mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Taufik Kurniawan, Ketua Gerindra Suhardi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Fraksi PD MPR Djafar H.

Selain itu hadir pula Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua DPD Laode Ida, Ketua MK Mahfud MD, Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto, Ketua Wanbin PG Akbar Tandjung, pengusaha nasional Sofyan Wanandi, Arifin Panigoro dan Rizal Ramli.

Dalam sambutannya sesuai menyampaikan deser-

Wakil Ketua DPR Pramono Anung Raih Gelar Doktor Dengan Predikat Cum Laude

tasinya Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku sempat ragu untuk mendapatkan gelar tertinggi di bidang keilmuan ini. “Selama ini saya pikir menjadi praktisi politik dan sudah dipraktekkan sehari-hari saja sudah cukup, tapi ternyata setelah kuliah dan menjalaninya berbeda,” papar dia.

Pramono menyatakan hasil yang ia peroleh merupakan bukti bahwa politisi tidak hanya bisa ribut saja, seperti yang dipertontonkan selama ini. “Saya bertekad untuk memberi contoh politisi itu bisa tepat waktu dan disiplin seperti saya, setiap hari Jum’at dan Sabtu saya kuliah tidak pernah bolos dan tepat waktu. Semua tugas saya kerjakan tepat pada waktunya, bahkan saya merasa dengan status yang saya sandang sebagai politisi dan saya dikasih tugas yang lebih banyak dari yang lainnya, mungkin para dosen ingin menguji kesungguhan saya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut,” tuturnya.

“Para dosen sudah menguji kesungguhan saya dalam menyusun disertasi ini. Alhamdulillah saya bisa membuktikan dari 33 mahasiswa seangkatan saya menjadi lulusan yang pertama. Saya bersyukur meski sebagai praktisi politik, saya masih bisa menjalankan pendidikan doktor dengan baik,” ujar Pramono Anung menambahkan. (wy)foto:wy/parle.



Suasana Sidang Pramono Anung saat mempertahankan Disertasinya.



Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas. Rabu (16/01), foto : Eka Hindra



Wakil Ketua DPR/Korpol Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Komisi II Agun Gunandjar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Bawaslu dan Gubernur Aceh. Selasa (15/01), foto : Wahyu



Komisi VIII DPR RI meninjau posko banjir di Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan serta menyampaikan bantuan berupa selimut, perlengkapan perempuan dan anak, serta sembako. Jumat (18/01) foto: Rizka



Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menerima Delegasi Komisi Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Finlandia. Rabu (16/01), foto : Wahyu